

Judul : UU Kesehatan ditolak karena tidak pro rakyat
Tanggal : Jumat, 14 Juli 2023
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 12

UU Kesehatan Ditolak karena tidak Pro Rakyat

Proses pengesahan UU Kesehatan yang disahkan DPR persis dengan UU Cipta Kerja. Benarkah tangan-tangan pemilik modal besar bermain pada dua undang-undang tersebut?

DESPIAN NURHIDAYAT
despian@mediaindonesia.com

PENOLAKAN terhadap UU Kesehatan yang baru disahkan pada Selasa (11/7) tidak hanya datang dari sebagian besar dokter dan tenaga kesehatan. Presiden Partai Buruh yang juga Presiden KSPI Said Iqbal, kemarin, menegaskan bahwa pihaknya menolak UU Kesehatan yang dinilai mengabaikan hak sehat, hak bekerja, hak untuk hidup layak, dan hak upah layak masyarakat dan pro kepada pemodal.

Said Iqbal kemudian menjelaskan bahwa UU Kesehatan mengancam sistem jaminan sosial nasional, khususnya terkait jaminan kesehatan. Program jaminan kesehatan bersifat spesialis, tetapi kemudian dijadikan generalis melalui *omnibus law* UU Kesehatan.

Alasan kedua, perubahan *mandatory spending* menjadi *money follow* program. "Dengan UU Kesehatan, ada urunan bayar. Misal, operasi jantung biayanya Rp100 juta. Bisa jadi pasien diminta membayar Rp50 juta, sedangkan Rp50 jutanya dibayar BPJS," ujar Said Iqbal.

Alasan lainnya, praktik dokter asing bisa dilakukan tanpa melalui organisasi profesi. Dokter asing masuk tidak perlu

diperiksa lagi, misal oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) atau Ikatan Dokter Gigi Indonesia (IDGI). "Ini sama saja mengabaikan nyawa rakyat," ujarnya.

UU Kesehatan, menurut Said Iqbal, kental sekali dengan liberalisasi, kapitalisasi, dan komersialisasi terhadap dunia kesehatan.

Partai Buruh menduga dan mencurigai ada permainan taipan yang mau bermain di industri kesehatan. Mereka bermaksud menguasai dari hulu sampai hilir. Rumah sakit swasta ingin mengambil kue BPJS, ke depan dampaknya rumah sakit kecil akan mati. Oleh karena itu, Partai Buruh dan KSPI berencana melakukan aksi di Istana dan DPR pada 20 Juli meminta agar UU Kesehatan dicabut.

Bertolak belakang dengan keinginan Partai Buruh, pihak Lippo Group yang usahanya juga bergerak di bidang kesehatan mendukung penuh visi pemerintah terkait UU Kesehatan karena diyakini mampu mendorong kualitas sistem kesehatan nasional.

Direktur Eksekutif Lippo Group John Rlady, dalam keterangannya, di Jakarta, kemarin, mengatakan UU Kesehatan itu akan mengakselerasi kebutuhan tenaga medis dan pemerataan kualitas kesehatan.

Menurut Presiden Komisa-

ris PT Siloam International Hospitals Tbk (SILOI) itu, semangat UU Kesehatan yang baru itu memberikan ruang pemerintah untuk melakukan berbagai kebijakan penguatan sistem kesehatan nasional. John juga mengungkapkan kekhawatiran masuknya tenaga kesehatan asing tidak perlu dibesar-besarkan.

Pengesahan UU Kesehatan direspons pasar saham secara positif. Saham SILOI mencatat peningkatan 9,89% atau naik 180 poin ke posisi Rp2.000 per saham pada perdagangan Selasa (11/7).

Beban rumah sakit

Berkaitan dengan program kelas rawat inap standar (KRIS) yang nantinya meniadakan lagi kelas 1, 2, 3, VIP, hingga VVIP bagi pasien rawat inap pemegang kartu JKN, menurut Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar, masih memiliki banyak masalah seperti biaya renovasi, yaitu kesiapan rumah sakit swasta.

Masalah lainnya ialah potensi penolakan dari pekerja penerima upah swasta dan ASN yang membayar secara persentase, tapi dapat layanan yang sama dengan PRI dan mandiri yang bayar secara nominal.

"KRIS berpotensi menurunkan pendapatan juran JKN dan ketidaksiapan rumah sakit melayani pasien JKN," ujarnya. KRIS sendiri sudah diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan. (Jam/Ant/H-1)